

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebenaran bahwa kebijakan hukum perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi belum berbasis nilai keadilan, menganalisis kelemahan-kelemahan kebijakan hukum perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi saat ini serta bertujuan menemukan rekonstruksi kebijakan hukum perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi yang berbasis nilai keadilan.

Penelitian ini dilakukan dengan paradigma konstruktivisme, menggunakan pendekatan *socio-legal-research*. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara/interview dan studi pustaka. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode diskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi saat ini belum efektif dan berkeadilan, hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya pihak tidak bertanggung jawab dan orang tua yang menjadikan anaknya pengemis dan pengamen hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari, pandangan ini dapat terlihat salah satunya pada kasus Gajahwong di Yogyakarta, dimana pihak yang melakukan eksploitasi adalah orang tua dari anak sendiri; adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan hukum perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi saat ini belum efektif dan berkeadilan ialah faktor budaya hukum masyarakat yang terdiri dari desakan ekonomi, pendidikan, keluarga, lingkungan, dan faktor moralitas. Kemudian faktor penegakan hukum. Perlu diadakan rekonstruksi terhadap beberapa pasal UU No 35 Tahun 2014 diantaranya Pasal 1 Butir 2 dan Butir 15, Pasal 26 Butir 1, Pasal 33 Butir 1, Pasal 53 Butir 1, dan Pasal 88. Diperlukan adanya peran aktif pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan, pencegahan, dan penanganan anak korban eksploitasi ekonomi, kemudian perlu adanya lembaga pemerhati yang lebih progresif dimana lembaga tersebut terdiri dari elemen akademisi, advokat, penegak hukum, pemerintah daerah dan pusat, serta lembaga swadaya masyarakat.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Kebijakan, Perlindungan, Anak dan Korban Eksploitasi Ekonomi

ABSTRACT

This study aims to analyze the truth that the protection legal policy for children victims of economic exploitation have not been based on the value of justice, analyze the weaknesses of the current protection legal policy for children victims of economic exploitation and aim to find the reconstruction of protection legal policy for children victims of economic exploitation based on the value of justice.

This research was conducted with a constructivism paradigm, using a socio-legal-research approach. Methods of data collection by means of observation, interviews / interviews and literature study. Furthermore, the data obtained were analyzed using quantitative descriptive methods.

The results of the study conclude that the implementation of protection for children victims of economic exploitation is currently not effective and fair, this is shown by the fact that there are still many irresponsible parties and parents who make their children beggars and singers just to fulfill their daily economic needs, this victory can be seen as wrong. the only one in the Gajahwong case in Yogyakarta, where the party who carried out the exploitation was the parent of the child; As for the factors that influence the implementation of policies for the protection of children who are victims of economic exploitation, which are not yet effective and just, are the factors of public legal culture consisting of economic pressure, education, family, environment, and morality factors. Then the law enforcement factor. It is necessary to reconstruct several articles of Law No.35 of 2014 including Article 1 Point 2 and Point 15, Article 26 Point 1, Article 26 Point 1, Article 53 Point 1, and Article 88. It is necessary to have an active role of local government in supervising, preventing, and handling child victims of economic exploitation, then there is a need for a more progressive observer agency where the institution consists of elements from academia, advocates, law enforcement, regional and central government, and non-governmental organizations.

Keywords: Reconstruction, Policy, Protection, Children and Economic Exploitation Victims